BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIKOM

2.1 Sejarah singkat

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank pemerintah tertua yang berasal dari Bank Pribumi pada jaman penjajahan. Dari sejak didirikannya sampai dengan sekarang, Bank Rakyat indonesia selalu mengarahkan kegiatannya di sektor pertanian. Pada jaman penjajahan Belanda tepatnya tanggal 16 Desember 1896 Bapak R. Bei Patih Ario Wiryaatmojo yang waktu itu menjabat patih di Purwokerto dan dikenal sebagai pencipta bank kredit pertanian dan perkoperasian bersama kawan-kawannya mendirikan *"De Poerkertosche Hulpen Spaarkbank en Inlandsche Hoofden"* (Bank penolong dan tabungan bagi priyai Purwokerto) atau disingkat menjadi "Bank Priyai Poerwekort", dengan akta otentik yang dibuat oleh Asisten Residen yaitu E. Sieburgh.

Tahun 1896 W.P.D de Wolff van westerrood, assisten residen Poerwokerto yang menggantikan E. Sieburgh bersama AI Schiff mendirikan *"De Poerwokertosche Hulf Spaarbank en Inlandsche Hoofden"*.

Kemudian pada tahun 1898 bersama pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Volkbanken* atau disebut juga Bank Rakyat, yang daerah kerjanya meliputi wilayah administrasi kabupaten atau *Afdeling,* sehingga kemudian dinamakan *Afdelingbank.* Akan tetapi *volksbanken* tersebut mengalami kesulitan, sehingga pemerintah Hindia Belanda turut campur tangan dalam perkreditan rakyat, dan sejak tahun 1904 pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Diehst der volkscredietwesen* (Dinas Perkreditan Rakyat) yang membantu *Volksbanken* baik secara materil maupun

immaterial dengan tambahan modal, bimbingan, pembinaan dan pengawasan, sehingga perkreditan rakyat mulai tahun 1904 menjadi *Regeringszorg* (tugas pemerintah).

Pada tahun 1912 pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu lembaga yaitu berbadan hukum dengan nama *Centrale Kas*, yang berfungsi memberikan bantuan pengawasan dan bimbingan keuangan kepada setiap Volksbanken dengan maksud dijadikan sebagai kas induk. Centrale Kas tersebut bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri. Sebagai akibat krisis ekonomi dunia yang hebat tahun 1929-1032 mengakibatkan beberapa Volksbanken tidak dapat berjalan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut maka pada tahun 1934 didirikan *Algemeene Volkscrediet Bank* (AVB) dengan stbl. 1934-82 yang berstatus badan hukum Eropadan Centrale kas dibubarkan. Modal pertama AVB berasal dari likuidasi Centrale Kas di tambah dengan kekayaan bersih Volksbanken. Dengan demikian AVB sebagai kelanjutan dari Centrale Kas dan merupakan integrasi dari *Volksbanken. Volksbanken-Volksbnken* didaerah dijadikan cabang-cabang AVB yang berkantor pusat di Jakarta dengan *Branch Banking System.*

Tugas AVB memberikan jasa penyimpanan uang, pemberian nasehat bantuan serta pengawasan kepada Bank-bank Kredit Desa, koperasi dan lain-lain. Dalam menjalankan pekerjaannya AVB tidak bertindak sebagai perusahaan yang menitik beratkan kegiatannya mencari laba tetapi lebih mementingkan segi sosial ekonomi dalam arti seluas-luasnya, terutama memberikan kredit kepada perseorangan, perusahaan kecil dan pedagang kecil yang tidak dapat memperoleh kredit dari bank-bank lain, dan umumnya berada di daerah perusahaan.

Pada pendudukan Jepang AVB di pulau jawa diganti namanya *Syomin Ginko* (Bank Rakyat) berdasarkan Osamu Seirei nomor 8 tahun 2602 (tahun Jepang) dan Undang-undang nomor 39 tanggal 03 Oktober 1942.

Setelah Proklamasi Kemerdekan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dengan peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1946 maka ditetapkan berdirinya Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bank pemerintah dan memberikan modal permulaan kepada yayasan bank Negara Indonesia yang kemudian menjelma menjadi Bank Negara Indonesia (BNI 46). Sementara itu pihak NICA di jakarta mendirikan kembali kantor besar AVB. Pada tahun 1948 ibukota RI Yogyakarta didududki Belanda, maka kantor besar BRI dihapuskan oleh NICA, dan direksi BRI dipenjarakan oleh Belanda karena tidak mau bekerja sama dengan AVB. Sejak itu kegiatan BRI terhenti sementara waktu.

Sebagai akibat tercapainya perjanjian Roem-Royen, maka kantor BRI hidup kembali, akan tetapi wilayah kerjanya hanya meliputi daerah yang dikembalikan kepada negara Republik Indonesia tahun 1945 (daerah Renville), sedangkan daerah lainnya diganti menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat (BARRIS).

Perkembangan sejarah politik Indonesia ternyata membawa pengaruh terhadap perkembangan sejarah BRI. Dengan Surat Kepurtusan Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat Indonesia tanggal 16 Maret 1959, direksi BRI dari Negara Bagian Republik Indonesia 1945 dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta untuk dijadikan Direksi BARRIS. Akan tetapi SK tersebut mendapat protes dari federalis karena kantor Besar BARRIS belum merupakan realita sehingga Menteri

Kemakmuran Republik Indonesia Serikat meralatnya dengan menamakan direksi baru itu adalah direksi AVB/BRI.

Meskipun sejak tanggal 17 Agustus 1950 Negara RIS dijadikan negara kesatuan tetapi AVB baru dibubarkan tanggal 29 Agustus 1951 berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1951 selain itu peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 1951 tanggal 20 April 1951 yang menjadikan BRI sebagai bank menengah dengan memberikan kredit kepada kelas menengah, yaitu para pengusaha dan pedagang kecil serta memberikan pinjaman kepada mereka yang tidak memperoleh kredit dari sumber-sumber lain. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kemudian BRI dijadikan bank devisa pada tahun 1957.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden untuk kembali kepada UUD 1945, maka dengan peraturan pemerintah pengganti UU (PERPU) nomor 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960 Lembaga Negara nomor 128-1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Dengan dibentuknya bank baru tersebut bank-bank dilebur dan diintegrasikan berturut-turut sebagai berikut :

1. BRI Berdasarkan PERPU Nomor 42 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960
2. PT Bank Tani dan Nelayan Berdasarkan PERPU nomor 43 tanggal 26 Oktober 1960
3. Nederlandscfe Handel Mij (NHM) setelah dinasionalisasikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1960 dan berdasarkan peraturan-peraturan menteri keuangan nomor 261206/BUM/II tanggal 30 November 1960. Dengan demikian BKTN adalah penjelmaan dari ke 3 bank tersebut di atas.

Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam perbankan yang baru, yang dikenal dengan system Bank Tunggal, maka semua Bank Umum Negara serta Bank Tabungan Pos berdasarkan Penpres nomor 8 tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965 dijadikan satu dengan Bank Indonesia dengan nama Bank Negara Indonesia yang dibagi menjadi 5 unit, yaitu:

1. Bank Indonesia menjadi BNI Unit I
2. BKTN menjadi BNI Unit II
3. BNI menjadi BNI Unit III
4. Bank Umum Negara menjadi BNI Unit IV
5. Bank Tabungan Negara menjadi BNI Unit V

Pada akhir tahun 1968 terjadi pengembalian fungsi Bank Indonesia menjadi Bank Sentral. BNI Unit II dipisahkan menjadi Bank-bank milik negara dengan nama :

- Bank Rakyat Indonesia dengan UU nomor 21 tahun 1968
- Bank Ekspor Impor Indonesia dengan UU nomor 22 tahun 1968

Menurut pasal 7 Undang-undang nomor 21 tahun 1968, secara lengkap tugas dan usaha BRI diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum, yaitu bank dalam pengumpulan dana menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek, dengan mengutamakan :

1. Pemberian kredit kepada sektor koperasi , tani, dan nelayan.
2. Pembantu rakyat yang belum tergabung dalam koperasi dan menjalankan kegiatan dalam bidang kerajinan, perindustrian rakyat, perusahaan dan pedagang kecil.

3. Pemberian bantuan terhadap usaha negara dalam rangka pelaksanaan politik agraria
4. Pemberian bantuan terhadap usaha pemerintah dalam pembangunan masyarakat desa.
5. Pembinaan dan pengawasan bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bank-bank sejenis berdasarkan petunjuk dan pimpinan Bank Indonesia.

Sumber dana BRI terdiri dari simpanan giro (rekening Koran), tabungan dan deposito. Dengan kebijakan penyesuaian tingkat suku bunga simpanan membuat penyimpanan uang di bank masih tetap cukup menarik bagi masyarakat.

Untuk mengenang sejarah BRI maka berdasarkan SK Direksi BRI No.Kep.S.67-Dir/12/1982 tanggal 2 Desember 1983 ditetapkan bahwa hari jadi BRI adalah tanggal 16 Desember 1896.

Perkembangan terakhir adalah perubahan status badan hukum BRI menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) melalui UU nomor 7 tahun 1992 dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1992, melalui akta notaries tertanggal 31 Agustus 1992 resmilah perubahan Bank Rakyat Indonesia menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero).

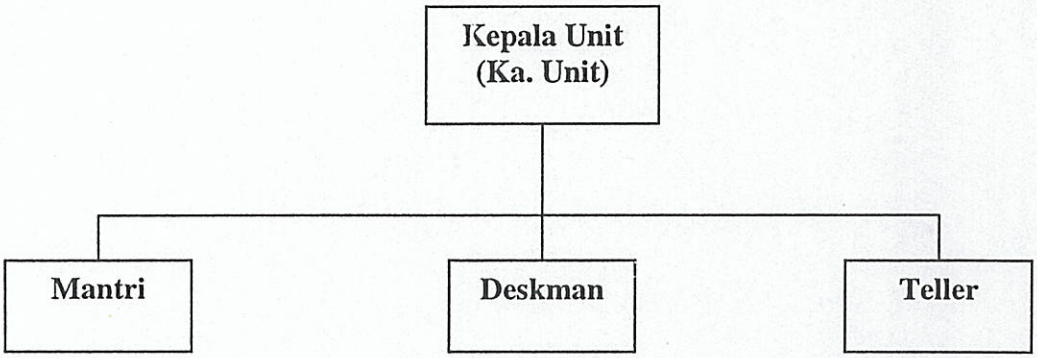
2.2 Struktur Organisasi

Organisasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang bekerja bersama-sama mencapai suatu tujuan, sedangkan struktur organisasi adalah susunan dari bentuk suatu organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing sebagai usaha untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu keberadaan struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat mutlak dibutuhkan untuk kelancaran organisasi di dalam melaksanakan aktifitasnya agar tertib, lancar, terorganisir dan sesuai dengan *job description* masing-masing bagian.

Dengan adanya struktur organisir diharapkan dapat menciptakan suatu [illegible] yang efektif dan efisien, serta dapat terciptanya suatu pengendalian intern, yaitu dengan pemisahan fungsi tiap bagian dalam organisasi dengan mengetahui tugas dan tanggung jawab tiap-tiap bagian dalam mencapai tujuan organisasi, seperti halnya pada struktur organisasi BRI Unit yang terdiri dari :

Gambar : Struktur Organisasi BRI Unit



2.3 Deskripsi Jabatan

✓ **Kepala Unit BRI (Ka. Unit)**

Tugas :

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BRI Unit yang dipimpinnya.

b. Mengkoordinir pelaksanaan kerja para petugas BRI Unit menjadi bawahannya.

c. Melakukan pengurusan dan penyimpanan Kas BRI Unit bersama Teller.

d. Melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme control di BRI Unit yang meliputi : pengurusan kas, administrasi pembukuan, register-register, berkas-berkas, surat berharga, logistic dan personil.

e. Memutus permintaan pinjaman, fiat bayar biaya eksploitasi, perintah pemindah bukuan, dan menanda tangani surat-surat. Hal-hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

f. Mengadakan hubungan dengan instansi-instansi/pihak lain yang berkaitan dengan tugas BRI Unit.

g. Memberikan bimbingan, membuat daftar penilaian kerja secara periodik serta usulan kenaikan pangkat bawahannya.

h. Melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman maupin simpanan.

i. Memperkenalkan dan memasarkan jasa-jasa perbankan kepala masyarakat diwilayah kerjanya dalam rangka mengembangkan usaha BRI Unit.

j. Kaunit harus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Mantri, Teller, Deskman dan menggantikan fungsinya dalam hal yang bersangkutan kepala masyarakat diwilayah kerjanya dalam rangka mengembangkan usaha BRI Unit.

k. Kaunit harus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Mantri, Teller, Deskman dan menggantikan fungsinya dalam hal yang bersangkutan berhalangan.

l. Menyampaikan laporan-laporan rutin maupun insidentil secara periodik dan sewaktu-waktu ke Sub Area Mikro.

m. Menyimpan, mengadministrasi dan membuat surat-surat yang berklrarifikasi rahasia dan sangat rahasia.

✓ **Mantri BRI unit**

Tugas :

a. Mengadakan pemeriksaan setempat, menganalisa serta mengusulkan putusan pinjaman Kepada Kepala Unit.
b. Melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan.
c. Memperkenalkan dan memasarkan jasa-jasa bank kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk berhubungan dengan BRI unit.
d. Mengadakan kunjungan kepada calon nasabah pinjaman dan simpanan potensial.
e. Melaksanakan penngendalian tunggakan dengan cara pemeiksaan setempat, menagih, serta menghasilkan langkah-langkah penyelesaian/pengamanan pinjaman.
f. Menyampaikan laporan kepada Kepala Unit atas hasil kunjungan dan pengamatannya kepada nasabah.
g. Memelihara rencana kerja dan buku turne.
h. Menyimpulkan data-data tentang potensi dan pengembangan situasi wilayah kerjanya untuk digunakan dalam rangka pengembangan BRI Unit.
i. Selalu berusaha meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya.

✓ **Deskman BRI Unit**

Tugas :

a. Melaksanakan pembukuan transaksi yang terjadi di BRI Unit.

b. Menatausahakan register-register yang mencatat proses pelayanan pinjaman.

c. Mengerjakan register surat berharga dan surat-surat yang berharga.

d. Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah/calon nasabah pinjaman dan simpanan.

e. Mengelola berkas pinjaman dan simpanan.

f. Mengerjakan laporan-laporan BRI Unit.



✓ **Teller BRI Unit**

Tugas :

a. Bersama Kepala Unit menyelenggarakan pengurusan kas BRI Unit.

b. Menerima uang setoran untuk rekening nasabah setelah dicatat/divalidasi computer.

c. Membayar uang kepada yang berhak setelah fiat bayar dan diadakan pencatatan.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Secara tradisional sebagai suatu bank umum yang memiliki fungsi sebagai lembaga Intermediary, maka kegiatan utama Bank Rakyat Indonesia adalah menghimpun dana dari berbagai sumber dalam bentuk simpanan dan menyalurkan

kepada pihak dana dalam bentuk pinjaman. Dari kedua kegiatan inilah diperoleh keuntungan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

2.4.1. Ruang Lingkup kegiatan PT. Bank Rakyat Indonesia

- Kegiatan usaha pengarahan dana (simpanan) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Simpanan tersebut berbentuk : Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, tabungan.
- Kegiatan Usaha Perkreditan adalah menyalurkan dan atau memberikan pinjaman dengan jenis-jenis kredit yang diberikan.
- Kegiatan Usaha Jasa Bank :
  - Dalam Negeri, berupa pengiriman uang dalam negeri, wesel, akreditif, inkaso, perantara perdagangan efek/saham/surat-surat berharga sertifikat danareksa, jaminan bank, safr deposit box, transfer elektronik, transaksi antar cabang, ATM, dan cek perjalanan BRI (CEPEBRI)
  - Luar Negeri, berupa ekspor, impor, pengiriman uang luar negri, jual beli valuta asing, bank notes, bank draft, travelers cheque, penagihan, jaminan bank, dan overseas loan.

2.4.2. Pinjaman yang Diberikan

Disektor pelayanan kredit, Bank Rakyat Indonesia memberi pelayanan kepada para pensiunan baik pensiunan PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, Swasta Bonafide, maupun karyawan BRI itu sendiri. Dengan berlandaskan pada SK.

2.4.2.1 Syarat Pemberian Kredit Pensiunan

Masyarakat atau nasabah yang ingin mengajukan permohonan pinjaman kredit, terlebih dahulu mendatangi petugas yang ada diruang pelayanan kredit pensiun untuk menyerahkan persyaratan yang diperlukan yaitu:

- Menyerahkan SK Pensiunan.
- Menyerahkan foto copy daftar pembayaran pensiun yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.
- Menyerahkan kartu identitas pensiun (KARIP).
- Maksimum pinjaman yang diterima tergantung besar uang pensiun. yang diterima setiap bulannya..
- Jangka waktu maksimal 4 tahun.
- Setiap debitur mendapatkan perlindungan asuransi jiwa otomatis.

2.4.2.2 Penilaian terhadap Calon Debitur Pensiun

Cara penilaian yang dilakukan oleh bank Rakyat Indonesia cabang lodaya dalam memilih nasabah adalah dengan melihat besar uang pensiun yang diterima setiap bulannya atau struk gaji, dan usia nasabah.

2.4.2.3 Keputusan dan Hasil Penilaian

Keputusan dari permohonan kredit pensiunan diterima atau tidak dilihat dari keaslian surat keputusan pensiunan. Kepala bagian kredit di

bank BRI mempunyai wewenang untuk memutuskan permohonan dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat, jika permohonan berada di luar batas wewenangnya, cabang harus menyusulkan terlebih dahulupermohonan fasilitas kredit tersebut. Kepada direksi atau kantor pusat disertai hasil penilaian serta kesimpulan dan usul yang definitive.

2.4.3 Kegiatan Usaha Jasa lainnya

Diantaranya yaitu penerimaan setoran Ongkos Naik Haji (ONH), dana orang tua asuh seperti GN-OTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh), penerimaam setoran pajak, bea dan cukai, zakat sesuai pengumuman presiden RI No. 1 tahun 1960.